



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 15 (Lima Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI
Hari, tanggal	: Selasa, 11 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Kontribusi sektor Minerba terhadap penerimaan Negara Tahun 2019 2. Realisasi investasi Tahun 2019 dan outlook investasi Tahun 2020 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 32 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 5 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 14 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 11 Februari 2020 dibuka pukul 13.15 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Kontribusi sektor Minerba terhadap penerimaan Negara Tahun 2019
 - b. Realisasi investasi Tahun 2019 dan *outlook* investasi Tahun 2020
 - c. Lain-lain

3. Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI diantaranya mengenai:
 - a. Pada tahun 2019, kontribusi sektor Minerba dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp44,8 Triliun atau telah melampaui dari yang ditargetkan yaitu Rp 43,3 Triliun. Sedangkan untuk realisasi investasi untuk sektor Minerba hanya mencapai USD 5,9 miliar atau meleset dari yang direncanakan yaitu sebesar USD 6,2 miliar (*sumber: Kementerian ESDM, 9 Januari 2020*).
 - b. Tidak tercapainya target investasi sektor minerba tersebut, dikarenakan investasi di Indonesia dinilai berisiko, rumit, dan tak kompetitif. Selain itu regulasi yang ada saat ini dianggap tidak dapat diprediksi, *inkonsisten*, dan saling bertentangan. Sedangkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, baru dalam tahap pembahasan lanjutan (*carry over*) dari periode sebelumnya.
 - c. Walaupun target investasi sektor Minerba Tahun 2019 tidak tercapai, namun Kementerian ESDM tetap mematok target investasi yang cukup tinggi pada Tahun 2020 yaitu sebesar USD 7,8 miliar. Sehingga perlu ada penjelasan dari Dirjen Minerba menyangkut tantangan/kendala yang dihadapi dan strategi (jangka pendek, menengah, dan Panjang) dari Pemerintah agar investasi sektor Minerba dapat meningkat pada tahun kedepannya.

4. Penjelasan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI sebagai berikut :
 - a. Kontribusi Sektor Minerba Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2019

Jenis PNBP Mineral dan Batubara	Bentuk Usaha
<ul style="list-style-type: none"> • Iuran Tetap/<i>Landrent/Deadrent</i> • Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara • Kontrak Karya (KK)

	• Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
• Penjualan Hasil Tambang	• Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Catatan :

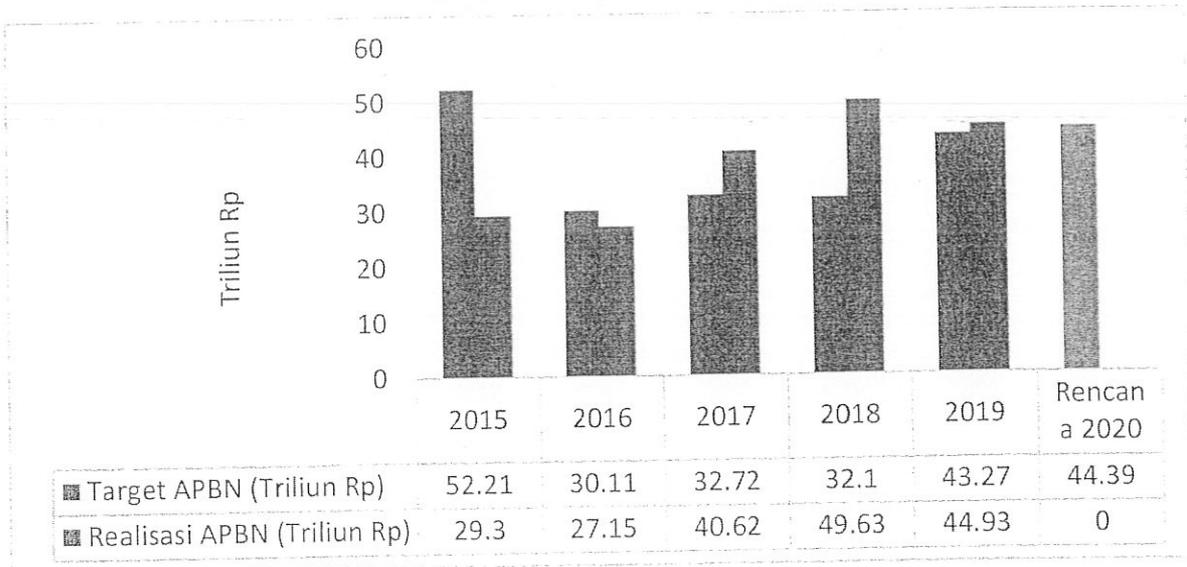
1) Iuran Tetap

- a. IUP : Luas Wilayah x Tarif PP No. 81/2019
- b. KK dan PKP2B : Luas Wilayah x Tarif PP No. 81/2019

2) Iuran Eksploitasi (Royalti)

- a. IUP : Tonase x Harga Jual x Tarif PP No. 81/2019
- b. KK : Tonase x Harga Jual x Tarif PP No. 81/2019
- c. PKP2B : Tonase x Harga Jual x 13,5% (sesuai Kontrak)

b. Target & Realisasi Penerimaan PNBPN TA 2015-2019



% Capaian	56,75 *)	90,19	124,15	154,62	103,86
------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

*) PNBPN tidak tercapai pada tahun 2015 karena HBA menurun tajam sampai dengan USD 54/ton (GAR 6322)

c. Realisasi Investasi Tahun 2019 dan Outlook Investasi Tahun 2020

Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Merencanakan Investasi	Target dan Realisasi		
		Target sesuai RKAB	Realisasi	Presentase
		Nilai Investasi (Juta USD)	Nilai Investasi (Juta USD)	
KK	28	602.7	672.7	111.6%
PKP2B	59	780.7	551.9	70.7%
IUP BUMN	3	636.0	149.4	23.5%
IUPK	2	1,412.0	1,302.6	92.3%
IUP (PMA & PMDN)	66	805.8	683.6	84.8%
IUP OPK Olah Murni	22	608.1	609.4	100.2%
IUJP	40	1,330.2	2,533.2	190.4%
TOTAL	220	6,175.6	6,502.8	105.3%

d. Rencana Investasi 2020 - 2024

(Dalam USD Juta)

No.	Izin	Jumlah Perusahaan yang Merencanakan (2020)	2020	2021	2022	2023	2024
1	KK	27	650,73	381,58	317,00	379,30	566,61
2	PKP2B	48	484,33	189,74	208,23	151,27	198,57
3	IUP BUMN	3	461,82	541,52	526,50	519,43	553,39
4	IUPK	2	2.373,00	1.345,07	1.296,24	1.300,22	1.497,72
5	IUP PUSAT	53	819,18	184,40	198,24	192,84	212,29
6	IUP OPK OLAH MURNI (OP)	11	1.586,21	1.548,60	835,67	-	-
7	IUJP	18	386,52	773,44	666,54	658,47	149,56
8	IUP Daerah	31	988,06	44,81	17,94	28,12	-
TOTAL (Juta USD)		193	7.749,85	5.697,31	4.359,30	3.229,64	3.178,15

Keterangan :

1. Investasi IUP BUMN meningkat tahun 2021 - 2024 karena rencana hilirisasi batubara (*Dimethyl Ether*);
2. Belum ada rencana investasi baru oleh IUP OPK Olah Murni pada tahun 2023 - 2024;
3. Data investasi IUP Daerah tahun 2020 tinggi karena ada pembangunan 2 (dua) smelter.

e. Kendala dan Solusi



Kepastian Hukum dan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Regulasi untuk Kepastian Invesetif • Pemberian Insentif fiskal dan Non Fiskal
Minimnya Greenfied exploration	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Regulasi untuk Kegiatan Eksplorasi oleh Junior olrh <i>Junior Mining Company</i> • Penugasan Kepada BUMN dan BUMD untuk melakukan penyelidikan dan Penelitian, Serta Eksplorasi pada Wilayah baru
Terlambatnya Kegiatan Eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisai Regulasi Antar sektor • Sinkronisasin kegiatan Inkronisasi Kegiatan dengan Sektor Lain Pada Ruang yang sama • Perjanjian kerja sama dengan KLHK

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melakukan penyempurnaan Sistem Pembayaran PNBP (Simponi Kemenkeu) menjadi ePNBP.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai pengawas kepatuhan perusahaan tambang guna meningkatkan PNBP dari sektor minerba.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menyelaraskan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait data-data perusahaan Minerba guna meningkatkan PNBP.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait perusahaan tambang yang hingga saat ini belum melakukan pembayaran PNBP dan kewajiban lainnya.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk mengembangkan sub sektor hilir minerba guna meningkatkan penerimaan negara dan menambah lapangan pekerjaan.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait jaminan reklamasi dan pasca tambang agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 20 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.00 WIB

Jakarta, 11 Februari 2020

KETUA RAPAT,

**DIRJEN MINERBA
KEMENTERIAN ESDM RI**

SUGENG SUPARWOTO
A-373

Ir. BAMBANG GATOT ARIYONO, M.M